

# Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating

Tatian Sartika Marbun<sup>1</sup>✉, Eka Nurmala Sari<sup>1</sup>, Irfan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

✉ [tatianmarbun@gmail.com](mailto:tatianmarbun@gmail.com)

doi <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i1.5032>

Published by Universitas Abulyatama

## Abstract

### Artikel Info

Submitted:

25-02-2024

Revised:

25-03-2024

Accepted:

20-04-2024

Online first :

30-04-2024

This study aims to test and analyze whether the regional financial information system and the clarity of budget targets affect the performance of the Regional Apparatus Organization of the Province of North Sumatra with organizational commitment as the moderator variable. This type of research is using an associative approach. The population in the study were staff employees at the Regional Apparatus Organization of North Sumatra Province. Respondents used are staff employees who fall into the category of Head of Division, Secretary, and Expenditure Treasurer with a total of 99 people. This study consists of independent variables of regional financial information systems and clarity of budget targets with the dependent variable on performance and organizational commitment as moderating variables. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis, analysis of Structural Equation Modeling (SEM) based on variance (Partial Least Square). The results showed that; (1) there is an influence of the regional financial information sistem on OPD performance; (2) there is an effect of clarity of budget targets on the performance accountability of OPD; (3) organizational commitment can moderate the influence of regional financial information systems on OPD performance; (4) organizational commitment can moderate the effect of clarity of budget targets on OPD performance

**Keywords:** Regional Financial Information Sistem; Clarity of Target Budget; Performance; Organizational Commitment

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah sistem informasi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderator. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah pegawai staf pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Responden yang digunakan adalah pegawai staf yang masuk dalam kategori Kepala Bagian, Sekretaris, dan Bendahara Pengeluaran yang berjumlah 99 orang. Penelitian ini terdiri dari variabel independen sistem informasi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran dengan variabel dependen kinerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis Structural Equation Modeling (SEM) berdasarkan variance (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) terdapat pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja OPD; (2) terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja OPD; (3) komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja OPD; (4) komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja OPD

**Kata-Kata Kunci:** Sistem Informasi Keuangan Daerah; Kejelasan Sasaran Anggaran; Pertunjukan; Komitmen Organisasional



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada Masyarakat. Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba. Sebagai lembaga pemerintahan tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang.

Peningkatan kinerja pelayanan publik merupakan isu penting dalam reformasi administrasi publik. Tuntutan peningkatan kinerja publik semakin besar jika dikaitkan dengan upaya pemerintah meningkatkan daya saing global. Tata pemerintahan yang baik adalah konsep pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Menurut (Bastian, 2010), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi sesuai perumusan *strategics cheme* suatu organisasi. Selanjutnya (Sedarmayanti, 2011) mengatakan bahwa Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi bagaimana seseorang mencapainya. Kinerja juga bermakna hasil yang di produksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu, yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut (Priansa, 2014). Pengukuran kinerja merupakan bagian terpenting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi publik maupun swasta. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah; (1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; (2) menyediakan sarana pembelajaran pegawai; (4) memperbaiki kinerja periode berikutnya; (3) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pengambilan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman; (5) Memotivasi karyawan (Mahmudi, 2010).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hubungannya dengan penyelenggaraan tugas dan peran manajerial SKPD/OPD pada pemerintah daerah adalah kinerja yang merupakan hasil dari

proses pekerjaan yang dilakukan oleh manajerial SKPD/OPD berupa pencapaian prestasi dari instansi tempat mereka bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, pengukuran kinerja SKPD/OPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD/OPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD/OPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah, yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Dalam Pasal 1 PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Capaian keluaran serta hasil dari suatu kegiatan atau program merupakan hasil kerja instansi, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Berikut ini merupakan capaian kinerja Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir: Kinerja instansi pemerintah dapat dikatakan dalam keadaan baik apabila hasil dari capaian kinerja tersebut memberikan nilai akuntabilitas, responsivitas dan responsibilitas yang baik. Akuntabilitas dari suatu organisasi pemerintah dapat dilihat dari ukuran target yang dicapai, responsivitas dapat dilihat dari prosedur dan keinginan masyarakat, dan responsibilitas dapat dilihat dari tanggung jawab dan administrasi pelayanan yang diberikan (Pasolong, 2010).

Untuk merealisasikan seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah, tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja terdiri dari kemampuan dan faktor motivasi (Mangkunegara, 2013). Kinerja juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan pada 3 (tiga) kelompok yaitu kompensasi individu orang yang bersangkutan, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen (Simanjuntak, 2005). Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja (Kasmir, 2016).

Selain faktor-faktor diatas, pandangan lainnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor individu berupa kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. Faktor psikologis berupa persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. Faktor Organisasi

berupa: motivasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (*reward sistem*) (Gibson, 2008). Untuk menindaklanjuti pencapaian kinerja pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kinerja pemerintah daerah erat hubungannya dengan sistem informasi akuntansi. (Sulastri, Tanjung, & Febrina, 2010) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja. Adanya keterlibatan pemakai dalam menjalankan sistem informasi akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi. Pada konteks sektor pemerintahan, dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan cara penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 yang mengamanatkan agar daerah menyampaikan informasi terkait keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Tingkat dari penggunaan suatu teknologi informasi itu sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri karena pada umumnya Pemerintah Daerah itu diberikan suatu Undang-Undang, aturan tentang bagaimana tata cara pengelolaan keuangan daerah tetapi dalam hal menyusun sistem yang bisa membantu mereka itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing dan akan menunjuk kembali pengembang-pengembang yang ada.

SIPKD dan SIKD adalah sistem yang dibangun untuk mengelola keuangan daerah yang mengacu kepada beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2007, serta regulasi lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hampir seluruh jenis aplikasi yang dipergunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya dipergunakan oleh mereka yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan.

Sesuai dengan fakta di Pemerintahan, mengolah data menjadi seluruh informasi yang nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini juga telah mengembangkan sistem informasi keuangan yang dinamakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dimana sistem tersebut diharapkan dapat lebih menunjang kerja para pegawainya dalam proses laporan keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tersebut dipakai oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Sumatera Utara, yang diharapkan sistem tersebut dapat mempermudah para staff pegawai dalam bekerja. Selain itu juga diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data-data keuangan daerah.

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dimana setiap transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun diinput dalam aplikasi SIMDA tetapi dalam proses penginputan ini tidak bisa keluar dari OPD masing-masing sehingga hal ini sangat tidak efisien dan efektif serta terintegrasi. Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menggunakan aplikasi baru E-keuangan. Kegiatan penginputan data keuangangan menggunakan E-Keuangan sama seperti penginputan pada aplikasi SIMDA, tetapi penyajian laporan keuangan tidak bisa diterapkan pada aplikasi E-Keuangan. Oleh karena itu penginputan data keuangan dilakukan kembali menggunakan aplikasi SIMDA.

Keberhasilan suatu penerapan sistem informasi dapat dilihat apabila sistem informasi tersebut telah memberikan informasi yang relevan, andal, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Supriyadi, 2017), (Ratmono & Sholihin, 2015), dan (Cenik & Hendro, 2016). Dalam pelaksanaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan dua aplikasi keuangan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangam daerah. E-keuangan digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan selama satu tahun dan aplikasi SIMDA digunakan untuk penyusunan laporan keuangan daerah sehingga pencatatan dan penyusunan laporan keuangan daerah tidak efektif dan efisien. Ketidak efektifan penginputan data dapat dilihat dari keandalan data yang dihasilkan, dimana dalam peroses penyusunan laporan keuangan petugas yang bertanggung jawab harus dapat menguasai dua aplikasi berbeda. Ketidak efisienan penyusunan laporan keuangan dikarenakan penginputan data keuangan dilakukan dua kali sehingga waktu penyajian laporan keuangan sering terjadi keterlambatan.

Selanjutnya, untuk mencapai kinerja yang baik bagi pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Kinerja akan efektif jika pihak bawahan diberikan kesempatan untuk dapat terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh penanggung jawab pencapaian target anggaran. Oleh karena itu, target anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan dengan jelas, spesifik, dan dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya (Santoso, 2008).

Penelitian (Rico, Kennedy, & Rheny, 2014) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan *good governance* terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula Implementasi penilaian kinerja SKPD yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap sistem informasi keuangan dan penganggaran, namun dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap anggota organisasi. Menurut (Kharis, 2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Kemudian (Moorhead & Griffin, 2013) mengemukakan, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota organisasi. Selain itu (Kreitner & Kinicki, 2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia tetap ingin menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan keterikatan emosional, identifikasi dan keterlibatan

karyawan pada suatu lembaga. Manfaat komitmen karyawan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas, menurunkan pergantian karyawan, dan meningkatkan kualitas manajerial.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sebagian Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak memperdulikan kepentingan dan tujuan organisasi serta sengaja mengabaikan pekerjaan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang ada di lingkungan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap suatu organisasi dapat dilihat dari segi komitmen afektif, yaitu perasaan emosional yang dimilikinya terhadap organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya, Kemudian dari segi komitmen berkelanjutan yang merupakan pemikiran akan manfaat yang diperoleh jika bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Selanjutnya komitmen seseorang terhadap suatu organisasi dapat dilihat dari segi komitmen normatif yang merupakan pemikiran bahwa ia memiliki rasa kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis (Bangun, 2013).

## **LANDASAN TEORI**

### **Kinerja Organisasi**

Dalam konteks Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hubungannya dengan penyelenggaraan tugas dan peran manajerial SKPD/OPD pada pemerintah daerah adalah kinerja yang merupakan hasil dari proses pekerjaan yang dilakukan oleh manajerial SKPD/OPD berupa pencapaian prestasi dari instansi tempat mereka bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, pengukuran kinerja SKPD/OPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD/OPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu.

Pengukuran kinerja SKPD/OPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah, yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Dalam Pasal 1 PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Capaian keluaran serta hasil dari suatu kegiatan atau program merupakan hasil kerja instansi, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa kinerja instansi adalah

seberapa besar pencapaian dari kegiatan/program atas penggunaan anggaran pada setiap instansi pemerintah dalam waktu tertentu.

Menurut (Wibowo, 2017) penilaian kinerja dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti Evaluasi tujuan dan saran, Evaluasi rencana, Evaluasi lingkungan, Evaluasi proses kinerja, Evaluasi pengukuran kinerja dan Evaluasi hasil. Dalam suatu organisasi, penilaian kinerja terhadap organisasi merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan antara kinerja dan penilaian kinerja merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti diungkapkan oleh (Mustopadidjaja, 2003) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu Indikator masukan (*input*), Indikator proses, Indikator keluaran atau (*output*), Indikator hasil (*outcome*), Indikator manfaat (*benefit*) dan Indikator dampak (*impact*). Sedangkan (Mahsun, 2006) dalam bukunya mengemukakan indikator dalam kinerja organisasi ialah sebagai berikut Masukan (*input*), Proses (*process*), Efisiensi, Keluaran (*output*), Hasil (*outcomes*), Manfaat (*benefit*) dan Dampak (*impact*).

### **Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Pengertian sistem menurut (Sutabri, 2012) pada dasarnya “sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. (Atmosudirjo, 2012) mendefinisikan bahwa sistem adalah suatu yang terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Selanjutnya Menurut (Yakub, 2012) bahwa “sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan”.

Pengertian Informasi Menurut (Yakub, 2012) “informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. Sedangkan menurut (Sutabri, 2012) informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan”. Selanjutnya (Azhar, 2007) mendefinisikan “informasi sebagai hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah (PP RI Nomor 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 15). Informasi Keuangan Daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan

dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (IKD) (PP RI No. 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 16).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Karakteristik kualitatif Sistem Informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut inimerupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki Relevan. Andal. Dapat dibandingkan. Dapat Dipahami.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Peran anggaran dalam lingkup pemerintah daerah menjadi sangat relevan dan penting. Hal ini terkait dengan dampak anggaran itu sendiri terhadap kinerja pemerintah, dan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Defenisi anggaran sektor publik menurut (Halim & Kusufi, 2013) adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masalah sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Kemudian menurut (Mahsun, 2006) mengatakan bahwa anggaran bukan hanya rencana keuangan yang menganggarkan besaran biaya dan pendapatan sebagai pusat tanggung jawab, tetapi juga menjadi alat yang dapat membangkitkan motivasi. Anggaran Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen dan kebijakan utama dalam pemerintahan daerah. Selain itu (Bastian, 2010) menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik, yaitu : aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Dalam upaya untuk pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif,(Halim & Kusufi, 2013)menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik tujuananggaran diantaranya adalah partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasarananggaran. Menurut(Locke & Latham, 2002), agar pengukuran kejelasan sasaran anggaran efektif terdapat 7 indikator yang diperlukan: Tujuan, yaitu membuat secara terperinci tujuan umum terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kinerja, yaitu menetapkan tujuan atas kinerja yang akan dicapai yang nantinya dapat diukur. Standar, yaitu menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. Jangka Waktu, yaitu menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pekerjaan. Sasaran Prioritas, yaitu menetapkan sasaran yang menjadi prioritas atau utama. Tingkat

Kesulitan, yaitu menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitandan tingkat kepentingannya. Koordinasi, yaitu menetapkan kebutuhan koordinasi atau komunikasi.

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan rasa untuk tetap mempertahankan keanggotaannya didalam organisasi dan tetap berusaha dengan segala kemampuannya demi tercapainya tujuan dan kepentingan organisasi. Menurut (Kharis, 2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Kemudian (Moorhead & Griffin, 2013) mengemukakan, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Selain itu (Kreitner & Kinicki, 2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan Komitmen Organisasi sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, komitmen organisasi berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan. Menurut (Bangun, 2013) menyatakan bahwa ada tiga dimensi komitmen organisasi adalah: Komitmen Afektif, Komitmen Berkelanjutan dan Komitmen Normatif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif dan verifikatif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dan data sekunder. Instrumen penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informasi sesuai fokus masalah penelitian. Sehingga yang menjadi informan dalam penelitian yaitu terdiri dari 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara akan di ambil 3 (tiga) orang responden yaitu Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran sehingga diperoleh sampel sebanyak 120 orang pegawai yang terlibat dalam Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SEM – PLS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri 40 kedinasan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemerolehan data melalui penyebaran kuisisioner kepada beberapa Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera utara yang termaksud dalam jabatan kasubbag Program, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 120 angket. Dalam pengisian kuisisioner, masing-masing responden diminta untuk mengisi identitas diri sesuai dengan yang terdapat dalam kuisisioner. Setiap responden diminta untuk memberikan tanggapan yang terbagi dalam lima kategori penilaian yaitu, Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Tidak Baik, dan Sangat Tidak Baik atas pernyataan-pernyataan yang di ajukan peneliti dalam kuisisioner. Kuisisioner penelitian yang disebarakan peneliti berjumlah 120 buah dengan tingkat pengembalian sebesar 82,5% atau sebanyak 99 buah.

### Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

#### *Construct Validity and Reliability*

*Construct reliability* dan *validity* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria *reliability* dan *validity* dapat dilihat dari *Cronbach Alpha* > 0,7 (Nunnally, Bernstein, Trinchera, & Amato dalam Juliandi, 2018), *Rho\_A* > 0.7 (Vinzi, Trinchera & Amato dalam Juliandi, 2018), *Composite Reliability* > 0,6 (Bagozzi, Yi, Chin & Dibbern dalam Juliandi 2018), *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5 (Fornell & Larcker dalam Juliandi 2018).

**Tabel 1. Construct Validity and Reliability**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1	0,978	0,986	0,980	0,832
X2	0,979	1,000	0,981	0,503
Z	0,932	0,934	0,974	0,748
Y	0,971	0,972	0,975	0,561
X1*Z	0,983	1.000	0,984	0,503
X2*Z	0,981	1.000	0,981	0,425

Berdasarkan data *Construct Validity and Reliability* pada tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa variabel X1, X2, Z, dan Y memiliki nilai *Cronbach Alpha* dan *Rho\_A* > 0.7, nilai *Composite Reliability* > 0,6 dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5. Maka *Validity and Reliability* seluruh variabel adalah baik.

### Diskriminant Validity (Validitas Diskriminan)

*Diskriminant Validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari, *Fornell-Larcker*, *Cirteiron*, *Cross Loadings*, *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Namun demikian, dalam *website* SmartPLS, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTM). Jika nilai HTMT < 0,90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Jorg Henseler Christian, M. Ringle, & Marko Sarsted 2015).

**Tabel 2. Heroit-Monotrait Ratio (HTMT)**

	X1	X1*Z	X2	X2*Z	Z	Y
X1						
X1*Z	0,075					
X2	0,513	0,383				
X2*Z	0,424	0,297	0,341			
Z	0,097	0,823	0,368	0,474		
Y	0,203	0,597	0,184	0,226	0,707	

Sumber: Diolah tahun 2021

Berdasarkan gambar pada tabel 2 diatas diperoleh hasil bahwa nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) seluruh variabel konstruk < 0.90, maka seluruh nilai variabel konstruk adalah valid.

### Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

#### R-Square

Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. Jika nilai  $R^2 = 0,75$  maka model adalah substansial (kuat), jika  $R^2 = 0.50$  maka model adalah moderate (sedang), jika  $R^2 = 0,25$  maka model adalah lemah (Juliandi, 2018).

**Tabel 3. Koefisien Determinasi (*R-Square*)**

	R-Square	Adjust R-Square
Y	0.654	0.635

Sumber: Diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil R-Square sebesar 0,645. Hal ini mengindikasikan keakuratan variabel X1, X2, dan Z dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 64,5%, maka model dalam penelitian ini tergolong moderat (Sedang). Kemampuan variabel X1, X2, dan Z dalam menjelaskan variabel Y juga dapat dilihat pada gambar berikut:

**f<sup>2</sup> (f<sup>2</sup>-Square)**

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen).

**Tabel 4. F-Square**

	X1	X2	Z	Y
X1				0.530
X1*Z				0.035
X2				0,359
X2*Z				0,163
Z				0,321
Y				

Sumber: SmartPLS

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat pengaruh f-square variabel eksogen X1 terhadap Y adalah sebesar 0,530. Hal ini mengartikan besarnya pengaruh dari variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 53,0%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X1 dalam memprediksi variabel Y adalah tinggi. Nilai f-Square variabel X1\*Z terhadap variabel Y adalah sebesar 0,035. Hal ini mengartikan besarnya pengaruh dari variabel X1\*Z terhadap variabel Y adalah sebesar 3,5%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X1\*Z dalam memprediksi variabel Y adalah rendah. Perolehan nilai f-square variabel eksogen X2 terhadap Y adalah sebesar 0,359. Hal ini mengartikan besarnya pengaruh dari variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 35,9%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X2 dalam memprediksi variabel Y adalah rendah. Nilai f-Square variabel X2\*Z terhadap variabel Y adalah sebesar 0,163. Hal ini mengartikan besarnya pengaruh dari variabel X2\*Z terhadap variabel Y adalah sebesar 16,3%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X2\*Z dalam memprediksi variabel Y adalah sedang.

Perolehan nilai f-square variabel X1 terhadap variabel Z yang di moderasi variabel Z sebesar 0,035. Hal ini mengartikan variabel Z dapat menguatkan pengaruh variabel X1 terhadap Variabel Y sebesar 3,5%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel Z memoderasi pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sedang. Perolehan nilai f-square variabel X2 terhadap variabel Z yang di moderasi variabel Z sebesar 0,163. Hal ini mengartikan variabel Z dapat menguatkan pengaruh variabel X2 terhadap Variabel Y sebesar 16,3%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel Z memoderasi pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah sedang.

### Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Analisis *direct effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen).

**Tabel 5. Pengaruh Langsung**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0,698	0.671	0.133	5,264	0.000
X1*Z → Y	0,217	0.197	0.103	2,114	0,035
X2 → Y	0,572	0.542	0.124	4,618	0.000
X2*Z → Y	0,451	0,432	0,143	3.152	0,002

Sumber: SmartPLS

Berdasarkan tabel 5 diatas diperoleh; pengaruh langsung X1 terhadap Y mempunyai koefisien jalur sebesar 0.698 (positif), maka peningkatan nilai variabel X1 akan diikuti oleh peningkatan nilai Y sebesar 69,8%. Pengaruh variabel X1 terhadap Y mempunyai nilai P-Values (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel X1 dapat mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya pengaruh langsung X2 terhadap Y mempunyai koefisien jalur sebesar 0.572 (positif), maka peningkatan nilai variabel X2 akan di ikuti oleh peningkatan nilai Y sebesar 57,2%. Pengaruh variabel X2 terhadap Y mempunyai nilai P-Values (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah signifikan. Pengaruh variabel Z dalam memoderasi hubungan variabel X2 terhadap Y mempunyai koefisien jalur sebesar 0.451 (positif), maka variabel Z memberikan dampak sebesar 45,1% terhadap hubungan variabel X2 terhadap Variabel Y. Pengaruh variabel Z dalam memoderasi variabel X1 terhadap Y mempunyai nilai P-Values (0.002) <  $\alpha$  (0.05), sehingga kemampuan variabel Z dalam memoderasi pengaruh variabel X2 terhadap Y signifikan.

### Pembahasan

#### Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Hasil analisis data tentang Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja OPD pemerintah memiliki nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah mempengaruhi kinerja OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berpengaruh terhadap Kinerja OPD dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,698 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempengaruhi pencapaian kinerja OPD pemerintah sebesar 69,8%.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan perolehan nilai dari loading faktor indikator relevan di peroleh nilai sebesar 0,907 dan 0,912 sehingga ketepatan dan kemampuan dari indikator relevan dalam membentuk atau memprediksi sistem informasi keuangan adalah baik. Pada indikator relevan yang di ukur dengan dua item pernyataan menunjukkan hasil rata-rata tanggapan responden sebesar 3,89 dan 3,87 yang keduanya berdasarkan skala pengukuran termaksud dalam kategori tinggi. Berdasarkan data tersebut sistem informasi keuangan daerah yang diaplikasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mampu memberikan output informasi secara lengkap yang berguna untuk pengambilan keputusan dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Namun data tersebut masih menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan berdasarkan skala pengukuran masih terdapat kekurangan pencapaian sebesar 1,11 dan 1,13 yang artinya masih terdapat kegagalan penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 22%.

Dalam melakukan pengukuran atau prediksi, Indikator keandalan memiliki nilai loading faktor sebesar 0,912 dan 0,930. Hal ini menunjukkan kemampuan dari variabel konstruk (keandalan) dalam membentuk atau memprediksi sistem informasi keuangan daerah adalah baik. Hasil pengujian deskripsi tanggapan responden pada indikator keandalan yang di ukur dengan dua item pernyataan menunjukkan hasil rata-rata tanggapan responden sebesar 3,84 dan 3,91 yang keduanya berdasarkan skala pengukuran termaksud dalam kategori tinggi. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan keandalan dari sistem informasi keuangan daerah telah mampu memberikan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun keandalan dari penerapan sistem informasi keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masih terdapat kegagalan penerapan yang diukur berdasarkan skala sebesar 1,46 dan 1,09 atau sebesar 25,5% ketepatan sistem informasi keuangan daerah dalam memberikan hasil output laporan keuangan belum tercapai sepenuhnya dengan baik.

Hasil pengujian menunjukan perolehan nilai loading faktor indikator kelengkapan sebesar 0,833 dan 0,931. Hal ini menunjukkan kemampuan dari variabel konstruk (kelengkapan) dalam membentuk atau memprediksi sistem informasi keuangan daerah adalah baik. Hasil pengujian deskripsi pada indikator (lengkap) yang di ukur dengan dua item pernyataan menunjukkan hasil rata-rata tanggapan responden sebesar 3,87 dan 4,00 yang keduanya berdasarkan skala pengukuran termaksud dalam kategori Baik. Hasil pengukuran sistem informasi keuangan daerah berdasarkan indikator kelengkapan menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah yang di terapkan telah mampu memberikan output informasi sesuai

dengan yang dibutuhkan para pemegang kepentingan serta output informasi yang dihasilkan tidak menghilangkan aspek-aspek penting. Namun berdasarkan perolehan data masih terlihat bahwa masih terdapat kegagalan atau pencapaian yang sepenuhnya belum terealisasikan. Berdasarkan skala pengukuran, sebesar 1,065 atau dengan tingkat persentase 21,3% sistem informasi keuangan daerah belum mampu memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dan tidak menghilangkan unsur atau aspek-aspek penting lainnya.

Pada indikator keempat yaitu (dapat dimengerti) hasil pengolahan data pada indikator (dapat dimengerti) yang terbagi dalam dua pernyataan yang digunakan untuk mengukur atau memprediksi sistem informasi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh hasil loading faktor sebesar 0,896 dan 0,923, dimana kedua hasil tersebut merupakan kategori sangat baik. Sehingga kemampuan dari variabel konstruk atau indikator (dapat dimengerti) yang digunakan untuk memprediksi atau mengukur penerapan sistem informasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara sangat baik atau memenuhi ketentuan.

Hasil pengujian deskripsi juga menunjukkan rata-rata tanggapan responden sebesar 3,95 dan 3,97 yang keduanya berdasarkan skala pengukuran termaksud dalam kategori Baik. Penerapan sistem informasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data hasil tanggapan responden terhadap pernyataan pengukuran yang digunakan menunjukkan hasil bahwa output yang dihasilkan sistem informasi keuangan daerah mampu dipahami dan dipelajari oleh pemegang kepentingan atau hasil informasi tersebut tidak membingungkan para pemegang kepentingan. Namun demikian masih terdapat pencapaian yang kurang efektif dikarenakan dari hasil pengolahan data tersebut ditemukan kegagalan pencapaian dengan berdasarkan skala pengukuran sebesar 2,08 atau tingkat persentase sebesar 20,8% hasil output sistem informasi keuangan daerah tidak dapat dipahami dan dipelajari para pengguna atau pemangku kepentingan.

Hasil pengolahan data pada indikator kelima yaitu (akses informasi) menunjukkan nilai loading faktor dari indikator akses informasi yang terbagi dalam dua buah pernyataan yang digunakan dalam memprediksi sistem informasi keuangan daerah memperoleh hasil loading faktor masing masing sebesar 0,911 dan 0,917. Hal ini menunjukkan kemampuan dari indikator akses informasi dalam memberikan kemudahan dan keamanan penggunaan sistem informasi keuangan daerah termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil pengujian deskripsi tanggapan responden yang di ukur dengan dua item pernyataan menunjukkan hasil rata-rata tanggapan responden sebesar 3,86 dan 3,89 yang

keduanya berdasarkan skala pengukuran termaksud dalam kategori Baik. Berdasarkan tanggapan responden terkait dengan akses informasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan akses informasi kepada para pengguna kepentingan yang dapat membantu dan mempermudah dalam mengaplikasikan serta memberikan privasi atau keamanan akses pada sistem informasi keuangan daerah. Namun berdasarkan data pengukuran dengan skala, masih terdapat kelemahan akses informasi pada sistem informasi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat adanya ketidak tercapaian sistem informasi keuangan daerah sebesar 1,12 atau berdasarkan persentase sebesar 22,5 % dalam memberikan akses informasi yang dapat membantu dan memberikan kerahasiaan atau privasi kepada para pengguna kepentingan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah mengembangkan sistem informasi keuangan yang dinamakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dimana sistem tersebut diharapkan dapat lebih menunjang kerja para pegawainya dalam proses laporan keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tersebut digunakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Sumatera Utara, yang diharapkan sistem tersebut dapat mempermudah para staff pegawai dalam bekerja. Selain itu juga diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data-data keuangan daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dimana setiap transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun diinput dalam aplikasi SIMDA namun dalam proses penginputan ini tidak bisa keluar dari OPD masing-masing. Kemudian Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan aplikasi baru E-keuangan. Kegiatan pengimputan data keuangan menggunakan E-Keuangan sama seperti pengimputan pada aplikasi SIMDA, tetapi penyajian laporan keuangan tidak bisa diterapkan pada aplikasi E-Keuangan. Oleh karena itu

pengimputan data keuangan dilakukan kembali menggunakan aplikasi SIMDA sehingga keefektifan dan efisien pekerjaan tidak tercapai.

Dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah, sistem tersebut harus mampu memberikan kejelasan dan kemudahan penggunaan kepada para pengguna sistem tersebut. Dalam penelitian ini permasalahan dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah adalah terjadinya kelemahan beradaptasi para pengguna dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah. Kegagalan penggunaan sistem informasi keangan daerah yang terjadi berdampak pada pencapaian kinerja kerja. Menurut (Ruky, 2011) kinerja organisasi tidak terlepas dari penggunaan Teknologi Informasi. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact* dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani, 2014) yang menunjukkan hasil bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah. Hasil penelitian ini juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marjoni, Amir, & Kahar, 2019); dan penelitian (Kassa, Asnawi, & Pangayouw, 2019) yang menunjukkan hasil sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD. Namun hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh (Panjaitan & Shopiana, 2017) bahwa sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif terhadap Kinerja OPD dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,572. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Kejelasan Sasaran Anggaran dapat mempengaruhi pencapaian kinerja OPD pemerintah sebesar 57,2%. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja OPD pemerintah memiliki nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga Kejelasan Sasaran Anggaran mempengaruhi kinerja OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hasil pengujian yang dilakukan pada indikator (tujuan) yang di ukur dengan dua pernyataan memperoleh nilai loading faktor sebesar 0,890 dan 0,910. Perolehan nilai tersebut menunjukkan kemampuan dari indikator (tujuan) dalam memprediksi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah baik. Hasil pengujian deskripsi menunjukkan hasil rata-rata tanggapan responden sebesar 3,68 dan 3,66 yang keduanya berdasarkan skala pengukuran termaksud dalam kategori Baik. Tujuan penerapan kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan pemerintah telah mampu merincikan tugas -tugas yang akan di kerjakan dan tujuan dari penetapan anggaran telah dimuat secara jelas dan spesifik. Namun berdasarkan data pengukuran dengan skala, masih terdapat ketidak tercapaian penerapan kejelasan sasaran anggaran dalam merincikan tugas -tugas dan tujuan. Hal ini terlihat adanya ketidak tercapaian berdasarkan persentase sebesar 22,5%

Hasil pengujian yang dilakukan pada indikator (pengukuran) yang di ukur dengan dua pernyataan memperoleh nilai loading faktor sebesar 0,914 dan 0,895. Perolehan nilai tersebut menunjukkan kemampuan dari indikator (pengukuran) dalam memprediksi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah baik. Hasil pengujian deskripsi menunjukkan hasil rata-rata tanggapan responden sebesar 3,69 dan 3,63 yang keduanya berdasarkan skala pengukuran termaksud dalam kategori Baik. Berdasarkan data tersbut diketahui bahwa penerapan kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan pengukuran yang spesifik dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan data tersebut pengukuran, masih terdapat ketidaktepatan pengukuran sasaran anggaran. Hal ini terlihat adanya ketidaktercapaian berdasarkan persentase sebesar 26,8%.

Pengujian yang dilakukan pada indikator standart kerja yang di ukur dengan dua pernyataan diperoleh nilai outer loading sebesar 0,884 dan 0,921. Hal ini menunjukkan kemampuan dari indikator standart kerja memprediksi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah baik. Hasil pengujian deskriptif juga menunjukkan perolehan rata-rata tanggapan responden sebesar 3,68 dan 3,67. Berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori baik. Dengan demikian penerapan standart kerja dalam penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah telah terlaksana dengan baik. Namun hasil pengujian juga menunjukkan adanya ketidak tercapaian penyusunan anggaran berdasarkan standart kerja. Hal ini terlihat adanya ketidak tercapaian penerapan standart kerja berdasarkan persentase sebesar 26,5%.

Pengujian yang dilakukan pada indikator jangka waktu yang di ukur dengan dua pernyataan diperoleh nilai outer loading sebesar 0,903 dan 0,898. Hal ini menunjukkan kemampuan dari indikator jangka waktu memprediksi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah baik. Hasil pengujian deskriptif juga menunjukkan perolehan rata-rata tanggapan responden sebesar 3,67 dan 3,67. Berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori baik. Dengan demikian penerapan jangka waktu pelaksanaan penyusunan dan realisasi anggaran yang dilakukan pemerintah telah terlaksana dengan baik. Namun hasil pengujian juga menunjukkan adanya ketidak tercapaian atau keterlambatan proses penyelenggaraan anggaran. Hal ini terlihat adanya ketidak tercapaian berdasarkan persentase sebesar 26,5%.

Pengujian yang dilakukan pada indikator sasaran prioritas yang di ukur dengan dua pernyataan diperoleh nilai outer loading sebesar 0,923 dan 0,902. Hal ini menunjukkan kemampuan dari indikator sasaran prioritas memprediksi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah baik. Hasil pengujian deskriptif juga menunjukkan perolehan rata-rata tanggapan responden sebesar 3,65 dan 3,70. Berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori baik. Dengan demikian penetapan sasaran prioritas realisasi anggaran yang dilakukan pemerintah telah terlaksana dengan baik. Namun hasil pengujian juga menunjukkan adanya ketidak tetapan dalam melakukan penetapan prioritas sasaran. Hal ini terlihat berdasarkan skala pengukuran adanya ketidak tercapaian sebesar 26,5%.

Pengujian yang dilakukan pada indikator tingkat kesulitan yang di ukur dengan dua pernyataan diperoleh nilai outer loading sebesar 0,897 dan 0,857. Hal ini menunjukkan kemampuan dari indikator tingkat kesulitan memprediksi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah baik. Hasil pengujian deskriptif juga menunjukkan perolehan rata-rata tanggapan responden sebesar 3,68 dan 3,67. Berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori baik. Dengan demikian penetapan dan pengukuran tingkat kesulitan dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan pemerintah telah terlaksana dengan baik. Namun hasil pengujian juga menunjukkan adanya ketidak tetapan pengukuran tersebut. Hal ini terlihat berdasarkan skala pengukuran adanya kegagalan sebesar 26,5%.

Dalam penyusunan rencana anggaran haruslah memenuhi kreiteria bahwa anggaran telah disusun berdasarkan penetapan tujuan, standart kinerja, jangka waktu dan sasaran prioritas (Locke & Latham, 2002). Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu anggaran merupakan pernyataan

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial* (Mardiasmo, 2009). Pelaksanaan penganggaran yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mampu mendukung peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah meskipun kegiatan penganggaran yang dilakukan telah di tingkatkan setiap tahunnya. Hal ini terjadi diakibatkan oleh tidak maksimalnya kegiatan penganggaran yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan tanggapan dari responden terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan penganggaran berupa pengukuran dan penetapan standar kerja dengan perolehan capaian pelaksanaan sebesar 72,6%. Kemudian, responden memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan standart kerja dengan tingkat persentase capaian sebesar 73,4%.

Ketidak tercapaian pengukuran anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran berdasarkan standar kerja akan berdampak pada kualitas kinerja dihasilkan. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. (Santoso, 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2015); bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja OPD. Kemudian penelitian ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan (Efrizar, Wiguna, & Meilda, 2017) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja majejerial. Dan penelitian (Wiprastini, Sinarwati, & Herawati, 2014); (Anjarwati, 2012) juga mengemukakan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja OPD.

### **Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Terhadap Kinerja OPD**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja OPD dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.217. Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja OPD memiliki nilai P-Values ( $0.035 < \alpha (0.05)$ ) sehingga Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja OPD. Hasil pengujian deskripsi data tanggapan responden atas variabel Komitmen Organisasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,24.

Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori cukup baik.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, pada variabel komitmen organisasi, nilai outer loading tertinggi seluruhnya ( $> 0,7$ ). Hal ini menunjukkan komitmen organisasi pegawai mampu memperkuat pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja. Nilai outer loading variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah yang ditunjukkan dari masing-masing indikator menunjukkan nilai yang  $> 0,7$ . Setelah dimoderasi oleh variabel Komitmen Organisasi perolehan nilai tersebut mengalami penurunan  $< 0,7$ . Nilai tertinggi terletak pada indikator sasaran prioritas yang dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi melalui indikator komitmen kontiniu sebesar 0.724. Perolehan nilai outer loading terendah berada pada indikator kelengkapan yang dimoderasi Komitmen Organisasi melalui indikator komitmen normatif. Penurunan nilai outer loading tersebut dikarenakan banyaknya ketidak tercapaian, atau rendahnya perolehan nilai pencapaian Komitmen Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siwambudi, Yasa, & Badera, 2017); bahwa Komitmen Organisasi Dapat memoderasi hubungan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja OPD. Kemudian dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ratifah & Ridwan, 2012) bahwa Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja.

### **Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja OPD**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja OPD dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.451. Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja OPD memiliki nilai P-Values ( $0.002 < \alpha (0.05)$ ) sehingga Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja OPD.

Hasil pengujian deskripsi data tanggapan responden atas variabel Komitmen Organisasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,24. Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori kurang memadai. Hasil pengujian menunjukkan nilai outer loading seluruh variabel Komitmen Organisasi ( $> 0,7$ ). Hal ini menunjukkan komitmen organisasi pegawai mampu memperkuat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja OPD. Nilai outer loading variabel Kejelasan Sasaran Anggaran yang

ditunjukkan dari masing-masing indikator menunjukkan nilai  $> 0,7$ . Setelah dimoderasi oleh variabel Komitmen Organisasi perolehan nilai tersebut mengalami penurunan  $< 0,7$ . Nilai tertinggi terletak pada indikator pengukuran yang dimoderasi oleh variabel Komitmen Organisasi melalui indikator komitmen kontiniu sebesar 0.644. perolehan nilai outer loading terendah berada pada indikator tingkat kesulitan yang dimoderasi Komitmen Organisasi melalui indikator komitmen kontiniu. Penurunan nilai outerloading tersebut dikarenakan banyaknya ketidak tercapaian, atau rendahnya perolehan nilai pencapaian Komitmen Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2012) bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja OPD. Penelitian lain juga mengemukakan hasil serupa bahwa komitmen organisasi dapat meoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja OPD (Zein & Supriono, 2016)

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1) Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja 2) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja. 3) Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kinerja. 4) Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal adalah 1) Diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan kejelasan dan kemudahan dalam penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah sehingga tanggung jawab kerja Organisasi Perangkat Daerah dapat meningkat lebih baik. 2) Diharapkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pengukuran kerja anggaran dan penetapan standart kerja penganggaran sehingga aspek-aspek dari tujuan kejelasan sasaran anggaran dapat lebih tercapai. 3) Diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih menyelaraskan peranan individu dengan keterampilan mereka, meningkatkan kepercayaan antara anggota organisasi melalui penyediaan *training* dan *workshop* yang mencukupi bagi kebutuhan kerja, menciptakan kepercayaan bahwa setiap pegawai memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bersama. 4) Diharapkan kepada pemerintah agar kedepannya untuk mempernaiki aspek aspek pencapaian kinerja berdasarkan kualitas, kuantitas, tanggung jawab, inovasi dan evisiensi sehingga kinerja OPD yang dihasilkan lebih optimal. 5) Kepada peneliti selanjudnya, penelitian ini dapat digunakan sbagai referensi.

Namun diharapkan untuk lebih menyesuaikan penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi dan indikator-indikator pengukuran yang digunakan sehingga pembuktian terhadap hipotesis penelitian dapat tercapai dan hasil penelitian lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, S. P. (2012). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bangun, W. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Greenberg, J., & Baron, R. A. (2000). *Perilaku Organisasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prentice Hall
- Halim, A., & Kusufi, S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kharis, I. (2010). Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 3 Bandung. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* , 3 (1).
- Kreitner, & Kinicki. (2017). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. *Academy of Management Review* , 13 (1), 23-39.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. A. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marwansyah. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Moorhead, G., & Griffin, R. W. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priansa, D. J. (2014). *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: Upp Stim Ykp.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rico, A. S., Kennedy, & Rheny. (2014). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Good Government terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan). *Jurnal Akuntansi* , 1 (2).
- Santoso, U. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* , 25 (3).
- Sedarmayanti. (2011). *Tata Kerja dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambella, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sulastri, Tanjung, A. R., & Febrina, S. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Umum Pemerintah Dikota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 18 (2), 121-132.
- Supriyadi, B. (2017). *Kebijakan Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Wibowo. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Surabaya: CV R A De Rozarie.
- Yakub. (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.